



Judul : Serap tenaga kerja, UMKM berperan stabilkan ekonomi
Tanggal : Minggu, 30 Juli 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Serap Tenaga Kerja, UMKM Berperan Stabilkan Ekonomi

ANGGOTA Komisi VI DPR Subardi meyakini sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja. Selain itu, basis usaha di UMKM terbukti kuat menghadapi berbagai krisis ekonomi. Sehingga, UMKM perlu dikembangkan dengan berbagai kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

"Usaha mikro itu langsung menyerap angka pekerja. Dari sektor ini, perputaran transaksi, produksi dan distribusi berjalan cepat. Ada dampak instan

bagi stabilitas ekonomi," kata Subardi usai bertemu dengan ratusan pelaku UMKM di Sleman, Yogyakarta, Rabu (26/7).

Subardi mengatakan, menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, pelaku UMKM didominasi usaha mikro dengan persentase 98,68 persen. Angka tersebut memiliki daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen. Dengan data itu, Indonesia memiliki basis ekonomi yang kuat.

Hanya saja, lanjutnya, perlu perhatian ekstra agar sektor usaha mikro cepat naik kelas.

Pemerintah harus mengambil kebijakan meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah.

"Sektor terbesar dari UMKM adalah sektor mikro. Tetapi tidak semua pekerjaannya sejahtera. Ini perlu perhatian ekstra agar sektor mikro cepat naik kelas dan pekerjaannya lebih sejahtera," tambah politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Ia mengungkapkan, Komisi VI DPR terus mendukung berbagai kebijakan relaksasi bagi UMKM, antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi

kredit, insentif perpajakan. Selain itu, berbagai akses modal usaha juga diberikan secara beragam.

"Misal melalui Kredit Usaha Rakyat/KUR yang disalurkan perbankan, kredit ultra mikro yang disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank dan penyaluran dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)," ucapnya.

Subardi juga mengaku terus mendampingi pelaku usaha mikro agar bisa mengakses berbagai kebijakan stimulus itu. Pendampingan dilakukan

dengan program pelatihan dan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Diharapkan, pelaku usaha mampu berinovasi dan adaptif dengan perkembangan zaman.

"Saya konsen mengawal UMKM agar mendapat akses itu. Tetapi UMKM juga perlu inovasi. Produksinya harus berkualitas, paham marketing digital agar pemusarannya luas, dan penting juga beri kemudahan transaksi bagi konsumen," ucap legislator asal Yogyakarta ini.

Sementara, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

mengungkapkan, pemerintah serius melindungi UMKM dari gempuran produk impor. Salah satunya, menyiapkan aturan penjualan produk asing di platform digital. Pertama, adalah adanya larangan penjualan ritel *online* lewat *cross border commerce* atau transaksi lintas batas.

"Ritel dari luar negeri tidak boleh lagi menjual produknya langsung ke konsumen. Mereka harus masuk lewat mekanisme impor biasa terlebih dahulu, setelah itu baru boleh menjual barangnya di pasar digital Indonesia," ucap Teten dalam

keterangan tertulisnya, kemarin. Kedua, melarang platform digital untuk menjual produk sendiri atau produk yang berasal dari afiliasinya. Dengan begitu, pemilik platform digital tidak akan mempermainkan algoritma yang dimilikinya.

"Kalau mereka jualan produk sendiri atau produk dari afiliasi bisnisnya, algoritmanya akan diarahkan ke barang-barang mereka sehingga konsumen di pasar digital hanya akan membeli dagangan mereka saja. Percuma saja walau UMKM sudah *onboarding*," kata Teten. ■ KAL